



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 25 Juli 2012

Halaman: 18

Pungutan Boleh Asal Peruntukkan Jelas

JOGJA—Keinginan sejumlah sekolah dasar (SD) untuk menerapkan sumbangan sukarela terhadap peserta didik guna mendukung peningkatan kegiatan dan pengajaran melalui integrasi mata pelajaran muatan lokal (mapel mulok) mendapat lampu hijau dari Disdik Kota Jogja.

Sekolah diperbolehkan meminta sumbangan itu, asalkan disetujui oleh komite sekolah, orangtua serta jelas peruntukannya pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Jogja, Sugeng Mulyo S mengatakan sumbangan sukarela dengan tujuan untuk peningkatan kualitas dan memenuhi kebutuhan siswa diperbolehkan. Namun hal itu harus mengacu pada kesepakatan, program dan kemampuan sekolah.

"Di samping sekolah dan orangtua siswa, pada forum pembahasan RAPBS. Selain itu, pada rancangan anggaran itu, juga harus disebutkan secara lengkap dan jelas tujuan serta besaran pembiayaan terkait kegiatan yang dilakukan. Jadi harus jelas," kata Sugeng kepada *Harian Jogja*, Jumat (20/7).

Ia menjelaskan, pungutan sumbangan sebenarnya tidak diperbolehkan untuk sekolah negeri, hal ini mengacu pada peraturan yang ada. Namun, jika dana pembiayaan dari BOS tidak mencukupi, dan pihak sekolah memiliki program yang jelas hal ini bisa dilakukan.

"Namun itu untuk kasus tertentu. Semisal, rencana untuk memasukkan unsur budaya dan kesenian dalam muatan lokal di sekolah A. Di mana sekolah A di lingkungan sekitar memang terdapat kesenian

yang bisa mendukung, dan bisa dimasukkan dalam unsur muatan lokal hal itu bisa dilakukan. Namun muatan lokal yang ada, seperti Bahasa Jawa, harus tetap ada," terang dia.

Meskipun begitu, Sugeng meniadakan, penarikan sumbangan sukarela dengan mengacu pada peningkatan unsur budaya itu juga harus mempertimbangkan kemampuan sekolah.

Jika dibutuhkan peralatan, sebenarnya sekolah bisa mengalokasikannya dalam BOS pada penyusunan RAPBS.

"Tentunya dengan catatan mekanisme sumbangan sukarela seperti infaq dan harus jelas perinciannya. Jika tidak, maka saat pengajuan RAPBS akan kami tolak dan sekolah bersangkutan harus mengurangi volume kegiatan di RAPBSnya," kata Sugeng.

Menurut Sugeng, berdasarkan pengalaman selama ini banyak sekolah yang mengalami kesulitan dan kurang paham bagaimana menyusun RAPBS.

Apalagi saat ini rancangan anggaran tersebut, harus mengacu pada rencana kegiatan dan anggaran. Karenanya, dia meminta sekolah benar-benar jeli terhadap rencana kegiatan yang dimasukkan dalam RAPBS, agar nantinya tidak ditolak oleh Disdik Kota Jogja.

Adapun Kepala Sekolah SD Suryodiningrat 2, M Daim mengatakan pihaknya sedang berusaha memasukkan unsur *heritage* dalam mapel mulok. Alasannya, kata dia, lebih kepada kedekatan dan keinginan pihak sekolah menanamkan budaya ke kalangan siswa. "Untuk kegiatannya nanti seperti apa, akan kami rapatkan lagi nantinya," pungkas dia. (Jumati)

th. :
akarta
Yogyakarta
arah
.....
th. :
Instansi

Tin

☐ Negatif ☐ Amat Segera ☐ Untu

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005